

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: PT. Gunung Agung. 2002.
- Adami Chazaw. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Grafindo Persada. 2002.
- Adrian Sutedi. *Hukum Perbankan (Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 1991.
- Arief Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2002.
- Cst Kansil, Christine, dkk. *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Jakarta: 2009.
- Dijan Widiyowati. *Perlindungan Hukum Pada Korban Salah Tangkap*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi. 2023.
- Djoko Prakoso. *Surat Dakwaan (untutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana)*. Yogyakarta: Liberty. 1988.
- Dominikus Rato. *Filsafat Hukum Mencari:Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo. 2010.
- Erdianto Efendi. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2011.
- G. Peters Hoefnagels. *The Other Side of Criminology*. Deventer Holand: Kluwer. 1969.
- Hotma P Sibues, et al. *Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2021.
- Iman Nofie. *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*. Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri. 2016
- Jan Remmelink. *Hukum Pidana, Komentat atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padananya dalam KUHP Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 1993.
- Leden Marpaung. *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.

- Lilik Mulyadi. *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*. Bandung: PT. Alumni. 2012.
- M. Arief Amrullah. *Money Laundering Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Bayumedia Publishing. 2004.
- Marlina. *Hukum Penitensier*. Bandung: Refika Aditama. 2011.
- Mertokusumo Sudikmo. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty. 1999.
- Muhammad Yusuf, dkk. *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Nasional Legal Reform Program. 2011.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penulisan Hukum*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2007.
- Muladi dan Arief Barda Nawawi. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. 2005.
- Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Rahardjo Satjipto. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sisem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. 1998.
- Rahman Amin. *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish. 2019.
- . *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Yogyakarta: Deepublish. 2023.
- Romli Atmasasmita. *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Ruslan Renggong. *Hukum Pidana Khusus (Memahami Delik-Delik di Luar KUHP)*. Jakarta: Kencana. 2016.
- Tri Andrisman. *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*. Bandar Lampung: Universitas Lampung. 2010.
- Zainal Abidin Farid. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.

B. Jurnal/Ilmiah

- Bambang Setioprojo, “Money Laundering Pandangan Dalam Rangka Pengaturan”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 3, Mei 1998.
- Doly Anwar, Dkk, “Tingkat Perkembangan Fintech (Financial Technology), Pemahaman Fintech (Financial Technology) dan Minat Mahasiswa UIN

Sumatera Utara,” *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 5, No. 3, Desember 2021.

He Ping, “New Trends In Money Laundering-Form The Real World to Cyberspace”, *Journal of Money Laundering Control*, Vol. 8, No.1, 2004.

Imam Dwiky Setyawan. *Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Financial Technology Selain Bank Perspektif Undang-Undsang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2018.

Ridwan Khairandy, “Pembaharuan Hukum Kontrak Sebagai Antisipasi Transaksi Electronic Commerce”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 16, November 2001.

Syauket, A., Hutagalung, Jm., & Prastio, Ma, “Fintech dan Bitcoin Modus Pencucian Uang Hasil Korupsi”, *Krtha Bhayangkara*, Vol. 17, No.1, Maret 2023.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Teknologi Finansial.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Sistem Pembayaran.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyedia Jasa pembayaran.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Uang Elektronik.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Perencana Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan, Siaran pers (OJK keluaran aturan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi), SP01/DKNS/OJK/1/2017.

D. Sumber lain

Fmr. Police Officer, Librarian and Family Arrested in Theft, <https://www.texomashomepgae.com/new/local-news/multi-arrests-made-in-organized-retail-theft>.

Kelebihan dan Kekurangan *PayPal*, <https://dailysocial.id/post/apa-itu-PayPal-2.htm>.

New Delrey Man Trafficked in THc-laced, Launderet Money PBSO says, <https://www.mypalmbeach.com/new/crime>.

PayPal digunakan sebagai dana aksi terorisme, <https://news.republika.co.id/berita/ojif8z330/bahrun-naim-gunakan-fintech-transfer-dana-kegiatan-terorisme>

Pencucian uang di Fintech, https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/969.htm.

Pengertian *PayPal*, <https://money.kompas.com/read/2022/01/07/224640526.htm>.

Putusan PN. Surakarta Nomor 7/PID.SUS/2011/PN.SKA.